

# Agama dan Kebinekaan di Indonesia: Membaca Peran Agama Sebagai Sistem Pemertahanan Kultur dan Harmoni

Naupal

## *Abstrak*

*Budaya Indonesia tidak bisa dilepaskan dari budaya agama, bahkan budaya agama sudah mengakar sejak awal kedatangan generasi pertama di negeri ini. tapi dalam tahun-tahun belakangan ini agama sering dijadikan alat oleh sekelompok orang untuk melakukan tindak kekerasan, munculnya radikalisme, dan fundamentalisme yang menegasikan the other. Suatu fenomena yang sangat menyedihkan sekali, jika dibandingkan dengan kondisi kehidupan beragama di masyarakat Indonesia pada masa klasik.*

*Dalam khazanah ilmu-ilmu social modern, agama ternyata tidak dikaitkan dengan konflik, melainkan lebih kepada integrasi dan harmoni. Di Indonesia agama, khususnya Islam telah menjadi satu dasar pemersatu yang penting, dan mampu beradaptasi dengan budaya setempat, sehingga agama menjadi system pemertahanan kultur dan harmoni. Selanjutnya agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai priestly religion, sebagai penyangga status qua, tetapi ia juga berfungsi sebagai propethic religion, yang menjadi model mobilisasi massa untuk menggerakkan perubahan.*

*Tulisan ini bertujuan mendiskripsikan bagaimana nilai luhur dan ideal dalam agama pada masa klasik di Indonesia telah menjadi sumber pemertahanan kultur dan harmoni dalam relasi pergaulan sesama, yakni Indonesia yang bineka tunggal ika. Gambaran data sejarah agama pada masa klasik di Indonesia dipandang penting untuk merekonstruksi masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural pada masa sekarang dan akan datang.*

*Kata kunci: agama, ritus, solidaritas, harmoni, plural, multicultural*

## *Pengantar*

Kita telah akrab dengan konsep “Bineka Tunggal Ika” sebagai identitas bangsa Indonesia. Kalimat itu hakikatnya diadopsi dari Filsafat Nusantara sebagai motto pemersatu Nusantara atas adanya keragaman pada zaman Kerajaan Majapahit. Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mencapai titik kesepakatan trilogy kebangsaan: satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang dikenal dengan sumpah pemuda, 28 Oktober 1928. Perbedaan daerah, suku, agama, dan bahasa local telah diendapkan dalam kesadaran kolektif kebangsaan yang lebih luas. Ikrar yang diucapkan dengan penuh ketulusan telah menumbuhkan kesadaran kebangsaan yang ideal hingga akhirnya tercapailah kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks dewasa ini, Indonesia menghadapi problem kemajemukan dan keragaman itu. Ada banyak agama, ada banyak ideologi, ada banyak pendekatan, ada banyak cita-cita, dan bahkan ada banyak kelompok. Maka masalahnya adalah bagaimana memecahkan problema realitas kehidupan antara kemajemukan dan kompleksitas di satu pihak dengan persatuan di lain pihak.

Ada dua faktor yang dapat dipertimbangkan sebagai sebab mengapa muncul integrasi semacam itu pada masa lalu dalam masyarakat Indonesia. Pertama adalah pemahaman akan gagasan nasionalisme oleh para pemimpin pergerakan sebagai satu produk ide modernitas yang terpenting pada masa pergerakan nasional melawan kaum penjajah, sebelum mereka sempat memikirkan bentuk negara; dan kedua faktor agama, khususnya agama Islam. Kedudukan Islam sebagai agama mayoritas telah menjadi pengikat berbagai suku yang tersebar di kepulauan nusantara dan merupakan salah satu dasar persatuan yang penting. Dalam sejarah Indonesia agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai *priestly religion*, sebagai penyangga status quo, tetapi ia juga berfungsi sebagai *propethic religion*, yang menjadi model mobilisasi massa untuk menggerakkan perubahan.

Pasca kemerdekaan, peran agama dalam sejarah kebangsaan Indonesia masih sangat strategis. keberhasilan program keluarga berencana pada masa orde baru, transmigrasi, swasembada pangan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemuka agama. Agama melekat pada multi dimensi baik, social, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu dalam konteks Indonesia tidak dikenal adanya pemisahan struktur agama dari negara, tapi juga agama dan negara bukan menjadi lembaga yang menyatu.

#### ***Teori dan Metodologi.***

Hakikatnya agama lahir dalam ruang budaya, dan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya di mana agama itu lahir, tumbuh, dan berkembang, sehingga kehidupan beragama merupakan gejala universal yang ditemukan sepanjang sejarah masyarakat, dari zaman klasik sampai kontemporer. Menurut Bergson (1859-1941) “ Kita menemukan masyarakat tanpa sains, seni, dan filsafat, tapi tidak ada masyarakat tanpa agama”. Bahkan agama adalah *the most important aspect of culture* yang terus berinteraksi dengan institusi budaya, baik budaya material, perilaku, pandangan hidup, seperti nilai moral, ekonomi, hukum, politik, seni dan sebagainya.

Agama merupakan representasi kolektif manusia<sup>115</sup>, sehingga gejala-gejala social seringkali ditafsirkan dengan perspektif religius, lebih-lebih masyarakat akan berpaling kepada agama untuk mencari jawaban atas kompleksitas social yang rumit. Semakin permasalahan itu fundamental dalam hidup social, semakin agama dengan mudah dapat ditemukan.

---

<sup>115</sup> Lihat Malcolm B. Hamilton, *The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspectives* ( London and New York :Routledge, 1995), hal. 97

Dalam khazanah ilmu-ilmu social modern, agama ternyata tidak dikaitkan dengan konflik, melainkan lebih kepada integrasi dan harmoni. Emile Durkheim salah seorang perintis ilmu sosiologi modern abad ke-19 berdasarkan penelitian yang ditulisnya dalam *The Elementary Forms of The Religious Life (1912)* menemukan hakikat agama pada fungsinya sebagai sumber dan pembentuk solidaritas mekanis. Ia beranggapan bahwa agama adalah suatu pranata yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengikat individu menjadi satu kesatuan melalui system kepercayaan dan ritus. Lewat symbol-symbol yang sifatnya suci, agama mengikat orang-orang ke dalam berbagai kelompok masyarakat. Singkatnya dapat dikatakan dalam sebuah masyarakat dapat dipastikan terdapat nilai-nilai yang dikuduskan (disakralkan), yang dikuduskan mengkondisikan anggota masyarakat untuk tunduk. Klasifikasi yang kudus dan yang profane demikian sentral dalam masyarakat beragama. Di dalam masyarakat Hindu misalnya klasifikasi tidak ditentukan berdasarkan kekuatan ekonomi, melainkan pada tindakan kekeramatan atau kesucian tiap-tiap orang, begitu juga dalam Islam, ketakwaan seseoranglah yang menentukan ketinggian derajatnya di sisi Tuhan.

Kajian tentang kebudayaan dan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari empat kata kunci, *the sacred*, klasifikasi, ritus dan solidaritas. *The sacred* adalah poros utama yang mencakup seluruh dinamika masyarakat. Dalam masyarakat selalu ada nilai-nilai yang disakralkan atau dikuduskan. Yang kudus dapat berupa symbol utama, nilai-nilai, dan keimanan (*belief*) yang menjadi inti sebuah masyarakat; sedangkan klasifikasi bisa ditemukan dalam semua lapisan masyarakat. Durkheim meyakini bahwa klasifikasi masyarakat yang paling primordial didasarkan pada diminesi normative dan religious. Dimensi normative dan religious menjadi design umum yang terdapat dalam kesadaran kolektif masyarakat. System klasifikasi bekerja dalam kesadaran moral dan emosional masyarakat; sebagaimana yang kudus dianggap sebagai nilai ultim suatu masyarakat, maka menjaga dan memelihara yang kudus itu menjadi kewajiban masyarakat yang dilakukan lewat ritus. Dalam ritus dihadirkan kembali makna realitas dalam masyarakat. Ritus berperan memperkokoh keberakoran rasa kolektivitas, dan menggiring anggota masyarakat meminum dari sumber kekeramatan yang sama, sehingga melahirkan solidaritas. Contoh dari solidaritas yang muncul dari agama adalah ketika banyak umat Islam yang pulang dari bermukim di Mekkah dan membangun koloni yang disebut koloni Jawi, mereka karena telah bertahun-tahun hidup dalam lingkungan keagamaan

yang kuat telah menciptakan kesadaran dan solidaritas Pan Islam untuk melawan colonial Belanda <sup>116</sup>

### ***Ruang Gerak Agama dalam Sejarah Indonesia***

Pada masa kesultanan, agama menjadi penyokong status qua kesultanan dan memelihara integrasi dengan solidaritas mekanis melalui penyelenggaraan ritus. Pada tahap ini, agama di Nusantara memiliki karakteristiknya sendiri yang menyatu dan beradaptasi dengan budaya local, suatu kecenderungan kearah pembentukan tradisi yang bercorak integrative. Inilah tradisi, di mana Islam mengalami proses pribumian secara konseptual dan structural, atau apa yang disebut pribumisasi Islam oleh Abdurrahmana Wahid<sup>117</sup>. Contoh yang paling konkret adalah ketika wali songo (sebut misalnya Sunan kalijaga) menjadikan ajaran Islam tidak dalam bungkus budaya arab, tapi dalam racikan dan cita rasa budaya jawa. Artinya masyarakat diberi bingkisan budaya jawa, lewat pagelaran wayang kulit sebagai media dakwah dan pendidikan rohani dengan menjadikan tokoh pewayangan yang menjadi idola masyarakat Jawa waktu itu, seperti tokoh-tokoh dalam pewayangan Mahabarata yang dimasukkan unsur-unsur Islam.<sup>118</sup> Dasar filosofi yang dikembangkan oleh para ulama adalah “*al-'adatu muhkamah*” : tradisi mengandung kearifan local yang harus dilestarikan, dan bisa dijadikan rujukan kalau tidak bertentangan dengan pesan universal agama.

Sumbangan besar Islam pada masa ini adalah munculnya kesustraan Islam dengan huruf arab pegon, arab melayu, seni pertunjukan wayang , dan tumbuhnya islam mistik (tasawuf) yang menonjolkan toleransi dan adaftasi. Tidak kalah pentingnya juga adanya pondok-pondok pesantren yang menjadi sarana pendidikan dan penguatan solidaritas keagamaan. Di pondok-pondok inilah diselenggarakan pendidikan agama, dan tidak sedikit yang juga mengajarkan tradisi mistik. Setelah keluar pesantren biasanya mereka menjadi tokoh-tokoh agama di daerah-daerahnya. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta, Surabaya; dan Sunan Giri di Giri.

Sedangkan pada masa kolonial, agama Islam mengambil bentuk formalnya sebagai gerakan perjuangan melawan penjajah (peran *prophetic religion*), Agama pada

---

<sup>116</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), hal. 33-34.

<sup>117</sup> Lihat Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001).

<sup>118</sup> Untuk lebih jelas, lihat K.H. Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 234-238.

masa ini merupakan sumber integrative yang menyatukan individu dan membentuk masyarakat atas dasar solidaritas mekanis, yang menjadi kekuatan pembebas. Peran agama *prophetic* ini hakikatnya peran pertama dari agama, perjuangan Nabi sebenarnya bukan hanya menyebarkan keyakinan atau iman kepada Allah SWT, walaupun tauhid adalah dasar dari seluruh ajaran nabi. Ketika Muhammad mulai diutus sebagai Nabi atau Rasul, setelah mendapat wahyu, masyarakat Arab sebenarnya telah mengenal Tuhan Yang Mahaesa, yang disebut Allah. Bahkan sebagian masyarakat Arab masih menganut agama hanif (penganut agama Ibrahim). Orang-orang Yahudi juga percaya kepada Tuhan Yang Mahaesa, demikian juga agama Kristen. Itulah sebabnya wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah membawa pada kebudayaan Baru, kebudayaan yang anti diskriminasi, anti rasial, tapi memuat persamaan (*musawat*), dan kemerdekaan dari perbudakan (*hurriyat*).

Sekalipun ajaran tauhid itu senantiasa ditekankan dalam ayat-ayat yang diturunkan, namun wahyu juga mengajarkan gagasan-gagasan social, ekonomi, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Salah satu ajaran yang menonjol yang terkandung dalam ayat-ayat makkiyah adalah kepedulian terhadap kemiskinan, perbudakan, dan etika bisnis. Dengan kata lain, Islam membawa misi perubahan social.

Sebagaimana juga dikatakan oleh Eric Fromm, dimensi kenabian tidak pernah bersifat murni spiritual, melainkan juga social dan politik. Sebagai seorang Yahudi Fromm mengambil Moses sebagai model. Sebagai seorang Nabi, Moses mengemban misi membebaskan umat Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Setelah kaumnya terbebas, dengan melakukan eksodus menyeberangi Laut Merah menuju ke tanah Harapan atau tanah yang dijanjikan Tuhan (*the promised land*), Moses membangun suatu masyarakat baru berdasarkan hukum Tuhan.

Lebih lanjut Fromm memberikan beberapa ciri misi kenabian. Pertama, nabi itu selalu mengabarkan tujuan hidup menuju Tuhan, sehingga dengan mendekati diri kepada Tuhan kehidupan manusia menjadi lebih manusiawi; Kedua, cara nabi untuk menyadarkan manusia agar manusia bisa mengatur perilaku mereka adalah dengan memberikan alternatif-alternatif dengan konsekwensi-konsekwensinya masing-masing; Ketiga, Nabi mewakili hati nurani rakyat banyak dan melakukan protes terhadap tindakan-tindakan manusia yang salah; Keempat, Nabi tidak hanya mengajarkan

keselamatan pribadi (*personal salvation*), tetapi juga keselamatan masyarakat; dan kelima, Nabi mengilhami kebenaran<sup>119</sup> .

Di Indonesia sejak awal abad ke- 20, mulai timbul berbagai gerakan keagamaan yang punya misi kebangsaan dalam situasi colonial. Pada masa itu pusat gerakan keagamaan lebih banyak tertuju kepada soal-soal kemasyarakatan, seperti pendidikan, social ekonomi. Para pemimpin pergerakan Islam, seperti H. Samanhudi, HOS Tjokoaminoto, Tirta Adisuryo mendirikan Serikat Dagang Islam<sup>120</sup>. Ideology mereka adalah Islam yang menolak kolonialisme dan menuntut kemerdekaan , baik dalam bidang ekonomi, maupun politik.

Menjelang dasawarsa 1930-an, pergerakan nasional maju selangkah lagi, yaitu mencita-citakan Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan. Setelah Sumpah Pemuda mengeluarkan trilogy kebangsaan “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Gerakan Islam juga mengikuti langkah maju itu. Namun, diskursus tentang gagasan social politik masih tetap berada pada tingkat gagasan kemasyarakatan, bahkan terdapat tiga aliran ideology besar, ideology Islam, komunisme, dan nasionalisme sekuler. Munculnya tiga aliran aliran tersebut menurut Deliar Noer disebabkan latar belakang pendidikan yang diterima oleh masing-masing tokoh pergerakan<sup>121</sup>. Pendapat lain menyatakan, perbedaan ideology itu merupakan kelanjutan wajar dari latar belakang budaya masyarakat, terutama Jawa. Proses islamisasi damai di Indonesia yang mengkompromikan ajaran Islam dengan nilai-niali budaya, telah melahirkan tiga golongan, santri, abangan, dan priyayi. Ideology Islam didukung oleh golongan santri, komunisme oleh golongan abangan, dan nasionalis sekuler oleh kaum priyayi.<sup>122</sup>

Ketiga aliran tersebut terlibat dalam konflik ideologis, sampai akhirnya tercapai kompromi antara kubu nasionalis sekuler dan Islam. Umat Islam memang gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari agresi Belanda yang datang dengan bantuan tentara sekutu untuk kembali menjajah Indonesia. Tokoh-tokohnya duduk dalam posisi-posisi politik penting, baik dalam kabinet maupun perjuangan fisik dan diplomatik. Sementara para santri terlibat langsung dalam perjuangan fisik sambil memekikkan takbir dalam perjuangan melawan sekutu sampai kemerdekaan Indonesia tercapai. Dalam pada itu usul agar setelah Indonesia merdeka, soal-soal keagamaan digarap oleh suatu

---

<sup>119</sup> Dikutip dari M. Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah, dan Peubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1999), hal. 193-194.

<sup>120</sup> Baca Amelz (ed.) *HOS Tjokroaminoto, Hidup dan perjuangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hal. 94.

<sup>121</sup> Baca Deliar Noer, *op.cit*, hal. 39

<sup>122</sup> Tentang tiga varian agama masyarakat Jawa, baca Clifford Geertz, *Santri, Abangan, dan Priyayi*, (Jakarta:Pustaka Jaya, 1980).

kementriaan tersendiri dan tidak lagi diperlakukan sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan. Kementerian keagamaan ini merupakan suatu konsesi kepada kaum muslimin yang bersifat kompromi: kompromi antara teori sekuler dan teori islam.<sup>123</sup>

Memasuki orde baru, konflik 3 aliran ideology mulai mereda, ideology komunis dibubarkan dan dilarang, dan Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal semua organisasi social dan politik berbangsa dan bernegara. Melihat sejarahnya, ada beberapa sebab mengapa Pancasila dapat diterima sebagai kesepakatan bangsa. Bagi gerakan Islam, alasan utama yang bersifat social politik bagi penerimaan Pancasila adalah karena dengan dan dalam Pancasila, seluruh unsur bangsa dan masyarakat bisa bersatu, karena ia adalah merupakan kesepakatan bersama untuk tunduk kepada nilai-nilai yang disepakati bersama itu. Ini juga berarti bahwa seluruh unsur bangsa dan masyarakat sepakat untuk bersatu. Sebab pokok mengapa gerakan Islam mau menerima kata sepakat ini adalah karena semua sila dalam Pancasila itu dinilai paling tidak bertentangan bahkan sesuai dengan ajaran Islam, terutama sila pertama, Ketuhanan Yang Mahaesa.

Dalam pada itu, ditariknya Islam dari level politik praktis tidak berarti menyurutkan peran islam dalam kehidupan kebangsaan. Banyak pemikir Islam malah beranggapan bahwa perjuangan islam cultural dalam pengertian luas menjadi semakin relevan dan justru lebih efektif.<sup>124</sup> Dalam decade 1970-an, hingga kini kegiatan Islam semakin berkembang bila dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Terlihat ada tanda-tanda kebangkitan Islam seperti, fenomena banyaknya mesjid-mesjid, musholla, pesantren, bahkan kini telah menjamur sekolah-sekolah islam terpadu yang diikuti dengan semakin tumbuh dan berkembangnya kesadaran beragama, terutama di kalangan anak muda. Pengajian-pengajian agama juga semakin semarak dengan jumlah jama'ah yang cukup banyak, baik di departemen-departemen, perusahaan-perusahaan, dan di lingkungan kampus-kampus. Ini mungkin dapat disebutkan sebagai kelanjutan proses islamisasi terhadap golongan abangan/priyayi yang berpendidikan.

Demikianlah peran agama yang kuat seperti di Indonesia, sangat mendukung cita-cita Negara ideal. Di sini agama dan Negara dipandang sebagai wadah dan sekaligus perwujudan nilai-nilai luhur. Itulah yang menjelaskan mengapa di Indonesia, demokrasi diberi predikat Pancasila. Karena demokrasi untuk merealisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan sekaligus agama. Sungguhpun demikian, sejalan dengan arus globalisasi, ada gerakan-gerakan keagamaan yang beragam, ada yang menitikberatkan dan

---

<sup>123</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 60.

<sup>124</sup> Baca Nurcholish Madjid, *Islam in Indonesia: Challenges and Opportunities*, dalam *Mizan*, no. 3, vol.I, 1984.

mengambil corak tebal tradisional, dan menjadikan tradisi sebagai sumber referensi dan fusi budaya dengan agama, tapi ada juga gerakan agama yang bersifat puritan, yang berusaha memurnikan ajaran agama dari nuansa budaya yang melahirkan aliran fanatisme dan radikalisme. Masalah yang dikhawatirkan dari radikalisme agama (Islam) adalah potensi konflik dan perpecahan sebagai akibat dari perbedaan cara pandang dalam melihat realitas kehidupan di dunia ini.

### ***Globalisasi dan Tantangan Bagi Agama***

Sebagaimana dikatakan sebelumnya sejalan arus globalisasi, dunia dihinggap dengan keragaman yang berarti ada keragaman nilai, dan loyalitas masyarakat semakin terbagi, karena setiap manusia hidup dalam ranah-ranah sosial, afiliasi, dan kode-kode moral yang beragam. Di tengah dunia global itu kita dihadapkan pada tiga tipologi masyarakat, yakni masyarakat moderat yang mau beradaptasi dengan dunia luar dengan tetap menjunjung nilai-nilai dan kultur yang ada; masyarakat sekuler yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, dan masyarakat fundamental-radikal, yang ingin memurnikan ajaran agama secara utuh, baik dari sisi isi maupun bentuk, ingin kembali seperti zaman di mana agama itu (baca Islam) lahir, tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang sudah sangat berubah.

Di sisi lain, dunia global ditandai dengan terjadinya suatu perubahan social yang sangat cepat karena semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat di berbagai belahan dunia dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Menurut Hoffman, akibat dari globalisasi akan timbul tiga hal yang saling berkaitan, pertama globalisasi ekonomi, di mana sebuah kebijakan nasional bidang ekonomi menjadi kurang berguna karena berjalannya ekonomi akan sangat ditentukan oleh kekuatan pasar dunia dan keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan transnasional. Globalisasi ekonomi merupakan dampak yang tidak bisa dilepaskan dari revolusi teknologi, revolusi informasi, perdagangan, investasi dan bisnis internasional. Aktor utamanya adalah perusahaan, investor, bank, industri jasa, negara, dan organisasi internasional.

Kedua adalah globalisasi kultural, yang juga merupakan turunan dari revolusi teknologi dan globalisasi ekonomi, di mana keduanya menciptakan dan membentuk arus perpindahan barang-barang kultural. Dilemanya adalah antara memilih uniformitas dalam selera atau gaya hidup seperti pakaian, makanan di seluruh pelosok dunia, atau



diversitas; dan ketiga adalah globalisasi politik yang merupakan produk dari dua bentuk globalisasi terdahulu. Bentuk yang terakhir ini ditandai dengan kuatnya pengaruh Amerika Serikat dan institusi-institusi politiknya serta berbagai jaringan organisasi internasional dan regional.<sup>125</sup>

Pasca reformasi dengan politik keterbukaan dan kebebasan, tantangan masyarakat Indonesia semakin berat dibandingkan sebelumnya, karena menghadapi eksistensi masyarakat plural, yang memiliki etnisitas, gender, ras, dan agama yang berbeda dengan moralnya masing-masing. Cara berada mereka merupakan cara berada yang baru, lengkap dengan penciptaan image-image yang baru. Ada masyarakat liberal dan sekuler yang percaya pada pluralisme moral, di lain pihak ada juga masyarakat primordial dan dogmatis yang masih mempertahankan eksistensi moralnya; dan ada juga masyarakat radikal yang tidak mau menerima pluralitas moral, dan berusaha memaksakan monisme moral di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Tantangan itu sebenarnya bisa dijawab jika kita bangsa Indonesia mengembangkan multikulturalisme dalam bingkai ideology Pancasila, dalam arti memilih model multikulturalisme yang sesuai dengan ideology Pancasila. Dalam konteks ini, seperti yang dikatakan oleh Kymlicka bahwa, bentuk multikulturalisme harus cair dalam kelompoknya, demikian pula dalam batasan kelompoknya, kebebasan dalam berafiliasi dan bukan pemaksaan; dan konsepsi identitas kelompok harus non eksklusif<sup>126</sup>. Di samping model batasan kelompok harus cair, kebebasan dalam berafiliasi, dan identitas kelompok non eksklusif sebagai yang digagas oleh Kymlicka sebagai nilai-nilai model multikulturalisme, maka dalam konteks Indonesia harus ditambah dengan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial.

Munculnya beragam konflik di Indonesia belakangan ini karena akibat tidak adanya *common platform* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka membangun Indonesia yang multicultural hanya mungkin dapat diwujudkan bila; Pertama, konsep multikulturalisme menyebarluas dan dipahami oleh masyarakat Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional untuk mengadopsi dan menjadikannya

---

<sup>125</sup> Stanley Hoffman, "Clash of Globalization", *Foreign Affairs* vol.81/4 , July/August 2002:107-108.

<sup>126</sup> Will Kymlicka, ed. May. *Etnicity, Nationalism and Minority Rights* (Modood and Squire, 2004), hal. 43.

sebagai pedoman; Kedua, kesamaan pemahaman di antara masyarakat Indonesia mengenai makna dan model multikulturalisme dan bangunan konsep yang mendukungnya. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, maka penerimaan pluralitas agama dan etnis merupakan suatu keharusan sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai ketuhanan, dan kemanusiaan. Dengan kata lain, manusia Indonesia perlu menghadapi adanya perbedaan etnis, agama, dan kepercayaan secara lebih manusiawi dan etis sebagai pengamalan dari nilai-nilai luhur Pancasila.

### ***Penutup***

Di Indonesia, agama memiliki ruang gerak structural dan mengambil dua bentuk; Pertama agama tampil sebagai *priestly religion* yang berfungsi sebagai penyangga status qua, seperti yang terlihat dalam lembaga keagamaan bentukan pemerintah. Di sini agama berfungsi sebagai penyambung lidah kebijakan pemerintahan; Kedua agama berfungsi sebagai *prophetic religion*, yang berfungsi sebagai kekuatan pembebas, yang merespon persoalan-persoalan konkret yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kezaliman, kemiskinan, dan ketidakadilan.

Walaupun dalam kenyataan empiris, agama bisa merupakan sumber konflik, namun hakikatnya agama tidak memihak kepada konflik, tetapi agama cenderung untuk menjaga harmoni dalam ikatan persaudaran, bersifat integaritif dalam menyatukan tindakan, dan bersifat adaptif dengan budaya setempat, sebagai yang ditunjukkan oleh para penyebar agama Islam pada masa klasik, dan sesuai dengan kaidah fiqh “ *al-‘adatu muhkamat*” (tradisi mengandung kearifan). Di sini agama membentuk system social yang membentuk masyarakat. Itulah sebabnya agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat (social-politik).

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelz (ed.) *HOS Tjokroaminoto, Hidup dan perjuangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952
- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung: Pustaka, 1983, hal. 60
- Geertz, Clifford, *Santri, Abangan, dan Priyayi*, Jakarta:Pustaka Jaya, 1980.
- Hamilton, Malcolm B. *The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspectives* , London and New York :Routledge, 1995.
- Hoffman, Stanley “Clash of Globalization”, *Foreign Affairs* vol.81/4 , July/August 2002:107-108.
- Kymlicka, Will *Etnicity, Nationalism and Minority Rights*, ed. May. Modood and Squire, 2004.
- Madjid, Nurcholish, “Islam in Indonesia: Challenges and Opportunities”, *dalam Mizan*, no. 3 , vol.I, 1984.
- Noer, Deliar *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Raharjo, M. Dawam *Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Wahid, Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantara, 2001.
- Zuhri, Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* , Jakarta: Bulan Bintang, 1976.